



Penguatan Literasi Digital dan Anti-Hoaks Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar

Strengthening Digital Literacy and Anti-Hoaxes Through Civics Learning in Elementary Schools

**Depri Yadi¹, Fitri Nurhaliza², Dwy Febiyanti³, Anisa Dwi Anggraini⁴, Susan Mareta⁵
Mandra jaya⁶**

Universitas Terbuka Palembang

Email: dpri4567@gmail.com¹, nurhalizafitri3@gmail.com², dwyfbynti@gmail.com³, dwiannisa738@gmail.com⁴, susanmareta455@gmail.com⁵, mandrajaya.ut.ac.id@gmail.com⁶

Article Info

Article history :

Received : 27-09-2026

Revised : 29-09-2026

Accepted : 01-10-2026

Pulished : 03-10-2026

Abstract

The development of the digital era demands that elementary school students be resilient to the flow of misinformation and fake news (hoaxes). This study aims to analyze the strategic role of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) in integrating digital literacy to strengthen students' character and critical thinking skills. Using a qualitative approach with content analysis through library research, data collection was conducted on academic literature and policy documents for the 2018–2025 period. The results indicate that the integration of digital literacy in PPKn learning successfully developed three dimensions of citizenship competency: civic knowledge, civic skills, and civic disposition. Learning strategies such as Think Check Share (TCS) and Fact-Checking Clubs have proven effective in improving students' ability to sort information and supporting the achievement of the Pancasila Student Profile, particularly in the dimensions of critical reasoning and global diversity. However, their implementation still faces obstacles such as limited teacher digital competence, limited parental literacy, limited class hours, and gaps in technological infrastructure. Therefore, cross-sector collaboration between schools, families, and the government is essential to realizing Indonesia's intelligent and civilized golden generation in the digital age.

Keywords: *Pancasila and Citizenship Education (PPKn), Digital Literacy, Student Character*

Abstrak

Perkembangan era digital menuntut peserta didik sekolah dasar untuk memiliki ketahanan terhadap arus misinformasi dan berita bohong (hoaks). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mengintegrasikan literasi digital guna memperkuat karakter serta kemampuan berpikir kritis siswa. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten melalui studi kepustakaan (*library research*), pengumpulan data dilakukan terhadap literatur akademik dan dokumen kebijakan periode 2018–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dalam pembelajaran PPKn berhasil membentuk tiga dimensi kompetensi kewarganegaraan, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Strategi pembelajaran seperti *Think Check Share* (TCS) dan *Fact-Checking Club* terbukti efektif meningkatkan kemampuan siswa dalam memilah informasi serta mendukung pencapaian Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi bernalar kritis dan berkebinekaan global. Kendati demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kompetensi digital guru, minimnya literasi orang tua, keterbatasan jam pelajaran, serta kesenjangan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor antara sekolah, keluarga, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan beradab di era digital.

Kata Kunci: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Literasi Digital, Karakter Peserta Didik



PENDAHULUAN

Menurut Boggs pada tahun 2010 menunjukkan bahwa keberhasilan itu didapatkan dari kualitas karakter seseorang yang mencapai 80% sedangkan 20% itu ada pada kecerdasan intelektual. Penelitian lain yang dilakukan oleh Heckman, James dan Pedro Carneiro pada tahun 2003 mengatakan hasil yang sama yaitu 20% keberhasilan seseorang ditentukan oleh kecerdasan intelektual dan sisanya adalah kecerdasan emosi (karakter dan akhlak mulia). Oleh sebab itu pentingnya membangun karakter peserta didik sejak dini (Jamiah, 2012). Seperti halnya menanam pohon semakin awal kita memupuk dan merawatnya maka akan semakin cepat pertumbuhan dan bagus kualitasnya. Begitupun peserta didik semakin dini dipupuk karakternya maka akan tumbuh karakter yang baik dan kecerdasan intelektual yang baik pula. Penanaman karakteristik anak, tak lepas dari pengaruh lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan sepermainan. Oleh sebab itu, sekolah sebagai salah satu tempat penanaman karakter hendaknya menciptakan budaya sekolah yang dapat membangun karakter peserta didik (Yulius, 2012). Pembentukan karakter merupakan pondasi penting bagi pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, upaya pembentukan karakter telah menjadi agenda nasional, salah satunya diwujudkan melalui kurikulum pendidikan, yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn). Anak sekolah dasar (SD) adalah fase krusial dalam pembangunan karakter, diusia dini anak mulai membangun pemahaman tentang diri, lingkungan dan masyarakat. Mereka sangat menghargai tentang pembelajaran dan nilai-nilai. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya memberikan pembelajaran tentang kenegaraan tetapi juga tentang pembagunan sikap baik, bertanggung jawab dan memiliki karakter mulia. Karakter yang dimaksud meliputi nilai-nilai kejujuran (Annisa, 2026).

Karakter merupakan nilai perilaku berdasarkan agama, norma, hukum, adat istiadat dan estetika dalam kehidupan bermasyarakat yang umumnya sudah dipelajari pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan karakter ini termasuk dalam sistem penanaman perilaku siswa yang berupa ilmu pengetahuan, kesadaran untuk melakukan hal baik kepada tuhan, sesama teman, manusia, diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Sehingga menjadi manusia yang berkarakter baik, oleh karena itu pentingnya pendidikan karakter. Pada pelajaran PKn di SD ini pendidikan karakter harus dibentuk semaksimal mungkin untuk membangun generasi emas dan karakter baik dimasa mendatang. Serta menjadikan siswa berkepribadian baik, dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan berpikiran kritis.

Dalam perspektif literasi media, kemampuan berpikir kritis menjadi aspek penting agar individu tidak mudah terpengaruh oleh informasi menyesatkan. Oleh karena itu edukasi tentang literasi digital, khususnya tentang berita hoax beserta dampak hukum bagi penyebar informasi palsu. Menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab siswa dalam bermedia. Berbagai upaya peningkatan literasi digital menunjukkan pendekatan edukatif melalui sosialisasi dan pendampingan merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk dilingkungan pendidikan. Kegiatan ini memungkinkan peserta memperoleh pengetahuan praktis tentang memverifikasi informasi, mengenali sumber yang kredibel, serta memahami etika dan regulasi dalam menggunakan media digital (Abimanik, 2022. Aliyyah, 2021. Indriyani, 2024). Salah satu yang selaras dengan keterampilan literasi digital adalah kemampuan berpikir kritis yang memungkinkan peserta didik untuk memilih dengan benar informasi. Dalam lingkungan digital yang penuh dengan informasi tidak tervalidasi, hoaks, dan manipulasi media, berpikir kritis menjadi benteng yang sangat diperlukan (Darmawan, 2023). Berbagai penelitian



menunjukkan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran membaca mampu meningkatkan pemahaman teks siswa sekolah dasar (Yang, 2019. Wicaksono, 2024).

Dengan adanya ruang digital, informasi tersebar luas sangat cepat dan beresiko terpapar berita hoaks, misinformasi, dan konten manipulatif. Karena siswa SD mulai aktif mengonsumsi konten daring (melalui gawai keluarga maupun lingkungan sosial), pembelajaran PKn perlu bertransformasi dari sekadar penguasaan konsep normatif menjadi pembinaan kapasitas warga digital: sehingga mampu menilai kredibilitas informasi, mengendalikan dorongan berbagi, serta mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan bermedia. Dalam kurikulum merdeka penguatan karakter dan kompetensi abad 21 terwadahi melalui profil pelajar pancasila. Pada dimensi bernalar kritis, peserta didik diharapkan mampu memproses informasi secara objektif, menganalisis, mengevaluasi, merefleksi dan mengambil keputusan. Namun, tanpa intervensi yang eksplisit, pembelajaran PKn berisiko tertinggal dari dinamika “banjir informasi” yang dialami siswa sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten (content analysis). Jenis penelitian ini bersifat studi kepustakaan (library research) yang mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks, dokumen kebijakan pendidikan terkait literasi digital dan pendidikan karakter di sekolah dasar. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari artikel akademik terpublikasi selama periode 2018-2025, Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, serta panduan resmi dari kementerian pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi (kemendikbudristek). teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti “literasi digital peserta didik”, “pendidikan anti hoaks disekolah” dan peran pkn dalam pembentukan karakter anak” pada basis data akademik google scholar, google books, ejournal, SINTA, dan portal resmi kemendikbudristek. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan menurut model Miles, Huberman, dan Sardana (2018), dengan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan temuan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggali makna, konteks, dan strategi integratif antara nilai-nilai kewarganegaraan dengan literasi digital secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Membangun Karakter Digital Peserta Didik Sekolah Dasar

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Sekolah Dasar memiliki peran mendasar dalam membentuk karakter digital peserta didik sejak usia dini. Berdasarkan Kurikulum Merdeka, PPKn di jenjang SD tidak hanya berfokus pada penguasaan materi normatif, tetapi juga pembinaan kompetensi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab di ruang digital. Integrasi literasi digital kedalam pembelajaran PPKn memungkinkan siswa memahami bahwa hak dan kewajiban berkewargaan juga berlaku di ranah maya, termasuk kewajiban untuk tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi (Iskandar & Nurgiansah, 2022). Peserta didik tingkat SD berada pada tahap perkembangan operasional konkret menurut piaget, sehingga pembelajaran harus dikemas secara kontekstual dan berbasis



pengalaman langsung. Metode cerita, permainan peran (role-play), dan diskusi kelompok tentang kasus hoaks sederhana telah terbukti efektif membantu anak usia 7–12 tahun menginternalisasi prinsip kejujuran dan tanggung jawab digital (Winataputra & Sukmadinata, 2021). Contoh nyata pembelajaran yang dikemas secara kontekstual dan berbasis pengalaman langsung terjadi pada Budi anak (kelas 6 SD) mendapat tugas dari guru “cari tahu informasi tentang banjir di Palembang, lalu buat laporan singkat. Di tahap operasional konkret (Piaget) Budi hanya bisa mengumpulkan data sederhana seperti membaca berita, menyimak video Youtube. Ia belum bisa menguji hipotesis sendiri. Saat masuk tahap operasi formal, Budi mulai berpikir abstrak: ia membuat pertanyaan: “apakah banjir ini karena curah hujan tinggi atau karena sampah Sungai?” ia mencari data curah hujan dari BMKG, membandingkan dengan foto banjir di Google Maps, lalu menarik Kesimpulan sementara. Ia juga mengecek apakah sumber berita tersebut dari media resmi (Kompas/Tempo) atau akun tidak dikenal. Program literasi digital nyata: BSSN dan Kominfo pernah mengadakan acara "Data Science for Kids" (2022) di mana siswa SD dikenalkan pada dasar-dasar ilmu data, pencarian informasi online, dan identifikasi sumber terpercaya — ini tepat mendorong perkembangan operasi formal mereka. Melalui pendekatan ini, aspek civic knowledge—pemahaman konsep literasi digital dan bahaya hoaks—berkembang seiring dengan civic disposition—sikap etis dalam berkomentar dan berbagi konten. Hasil observasi lapangan oleh Alhakim et al. (2025) di beberapa SD di Batam menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam program literasi digital berbasis PPKn mampu mengidentifikasi berita palsu sederhana seperti judul clickbait dan gambar editan dengan tingkat ketepatan mencapai 68%, meningkat dari 31% sebelum intervensi.

2. Strategi Pembelajaran Anti-Hoaks Berbasis Think Check Share dan Literasi Media di Kelas SD

Strategi Think Check Share (TCS) merupakan salah satu pendekatan paling populer dan terbukti efektif dalam memerangi hoaks di kalangan peserta didik SD. Framework ini dikembangkan oleh News Literacy Project (NLP) dan terdiri dari tiga langkah sederhana: Think (berpikir sebelum membagikan), Check (memeriksa keakuratan sumber), dan Share (membagikan hanya setelah yakin). Di kelas SD, implementasi TCS dapat disesuaikan dengan kemampuan kognitif anak melalui media visual seperti infografis, video pendek, dan kartu pertanyaan. Contoh kegiatan nyata di sekolah: Guru menampilkan sebuah pesan viral: “Besok sekolah diliburkan karena alasan tertentu.” Siswa menerapkan Think–Check–Share: Think: Mengapa pesan ini dibuat? Apakah bahasanya mendesak dan meminta segera diteruskan? Check: Siswa mencari pengumuman pada kanal resmi sekolah atau dinas terkait serta membandingkan dengan sumber terpercaya. Share: Jika tidak ada pengumuman resmi, siswa membuat respons: “Informasi ini belum terverifikasi. Mari menunggu pengumuman dari sekolah,” bukan meneruskannya sebagai fakta. Darmawan et al. (2023) selain itu juga melaporkan bahwa program pelatihan TCS selama empat pertemuan di lima SD di Surabaya meningkatkan skor literasi digital siswa dari rata-rata 52 menjadi 79, dengan perubahan terbesar terlihat pada dimensi "kemampuan membedakan fakta dan opini". Selain TCS, strategi lain yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran PPKn adalah Fact-Checking Club atau klub cek fakta sekolah. Aktivitas ini mendorong siswa secara berkelompok menelusuri klaim viral menggunakan mesin pencari dan situs verifikasi resmi seperti Cebontes (Kemkominfo)



atau TurnBackHoax.ID. Dari segi psikologis, kegiatan ini memperkuat civic skills—keterampilan praktis warga negara—melalui latihan berulang menemukan, menilai, dan memutuskan kebenaran informasi. Kholis dan Rosyada (2022) menegaskan bahwa frekuensi praktik verifikasi berkala lebih berpengaruh terhadap pembentukan kebiasaan berpikir kritis daripada sekadar ceramah teoritis tentang bahaya hoaks. Guru PPKn dapat memanfaatkan waktu Jam Belajar Mandiri atau proyek P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) untuk menyelenggarakan aktivitas cek fakta mingguan yang menyenangkan dan relevan bagi peserta didik.

3. Hambatan Implementasi Literasi Digital dalam Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar

Implementasi literasi digital dalam pembelajaran PPKn di SD menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural. Pertama, kompetensi digital guru masih terbatas; survei BSSN (2023) mencatat bahwa hanya sekitar 38% guru SD di Indonesia yang menyatakan diri mahir menggunakan alat verifikasi informasi daring. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya modul ajar siap pakai yang terintegrasi dengan kurikulum PPKn SD—sebagian besar materi literasi digital tersedia dalam format tutorial teknis tanpa kaitannya dengan nilai-nilai kewarganegaraan. Kedua, durasi tatap muka PPKn yang relatif singkat (hanya 2–4 jam per minggu) menyulitkan pendalaman topik seperti hoaks yang memerlukan pembahasan repetitif dan reflektif. Sari dan Widodo (2021) menemukan bahwa 62% guru PPKn merasa waktu pembelajaran tidak cukup untuk membahas isu aktual secara tuntas. Hambatan ketiga berasal dari lingkungan rumah. Banyak orang tua peserta didik SD sendiri belum memiliki literasi digital yang memadai, sehingga fungsi pemantauan dan modeling di rumah minim. Anak-anak cenderung meniru pola konsumsi media orang tuanya, termasuk kecenderungan langsung mempercayai dan meneruskan pesan berantai WhatsApp. Winarno (2020) menekankan pentingnya sinergi antara sekolah dan keluarga dalam menanamkan kebiasaan verifikasi informasi. Hambatan keempat adalah akses teknologi yang tidak merata antarwilayah; siswa di daerah terpencil masih kesulitan mengakses internet stabil, sehingga pembelajaran literasi digital berbasis perangkat gawai menjadi terhambat. Tanpa dukungan infrastruktur dan pelatihan berkelanjutan, integrasi literasi digital dalam PPKn berpotensi hanya menjadi wacana tanpa implementasi nyata di lapangan.

4. Regulasi dan Kebijakan Nasional yang Mendukung Literasi Digital di Lingkungan Pendidikan Dasar

Indonesia telah menyusun kerangka kebijakan nasional yang mendukung penguatan literasi digital, meskipun implementasinya di tingkat SD masih berjalan bertahap. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar Proses menyebutkan bahwa muatan lokal dan proyek penguatan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan daerah, membuka peluang bagi sekolah untuk mengintegrasikan literasi digital ke dalam RPP PPKn. Selain itu, Gerakan Literasi Nasional (Gelitin) yang dicanangkan Kemendikbudristek sejak 2016 secara eksplisit memasukkan literasi digital sebagai salah satu dari tujuh gerbang literasi nasional, sejalan dengan arahan UNESCO (2021) mengenai Media and Information Literacy for All. Di tingkat hukum, UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar yuridis sanksi pidana bagi siapa pun yang menyebarluaskan berita bohong yang merugikan



masyarakat. Pasal UU ITE Isi Relevansi dengan Sosialisasi Kominfo/BSSN Pasal 28 ayat (1) Dilarang menyebar berita palsu/memalsukan agar menimbulkan kebencian/gangguan masyarakat Siswa diajarkan: jangan share berita tanpa dicek dulu, Pasal 28 ayat (2) Sanksi penjara max 6 tahun & denda max Rp 1 Miliar Penegasan konsekuensi hukum bagi penyebar hoaks Meskipun pasal ini kerap dikritik karena dikhawatirkan menekan kebebasan berekspresi, kehadiran regulasi ini memiliki efek jera sekaligus sinyal penting bahwa penyebar hoaks—termasuk pelajar—dapat pertanggungjawabkan secara hukum (Rahayu et al., 2025) Inisiatif populer seperti kampanye "3L" (Lirik, Lokal, Legit) yang dipromosikan Kominfo dan BSSN telah diadopsi dalam beberapa program sekolah sebagai mnemonic mudah diingat siswa SD. Sosialisasi rutin kerja sama antara dinas pendidikan setempat bersama BSSN/Kominfo juga mulai dilaksanakan di beberapa kabupaten, misalnya di Kabupaten Tangerang dan Kota Bandung, menunjukkan tren positif integrasi regulasi ke praktik kelas PPKn. Tim Kominfo datang ke sekolah membawa modul "Internet Sehat" Memberikan stiker/perengkapan bertema literasi digital Membuat siswa menandatangani janji "Saya akan bijak berselancar di internet" Menampilkan contoh kasus nyata pelanggaran UU ITE kepada remaja.

5. Manfaat Positive Literasi Digital terhadap Pembentukan Profil Pelajar Pancasila dan Partisipasi Sipil Muda

Integrasi literasi digital ke dalam pembelajaran PPKn memberikan dampak positif yang saling terkait terhadap pembentukan Profil Pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi Berkebinekaan Global (Siti mengenakan pakaian adat Jawa saat lomba budaya di sekolah, sekaligus mempelajari tarian Bali dari temannya. Ia bangga budaya lokal tapi tetap terbuka pada budaya lain.) dan Bernalar Kritis (Maya membaca berita viral soal "air mineral menyebabkan covid". Ia tidak langsung percaya, lalu mengecek ke situs resmi Kemenkes dan menemukan itu hoaks. Ia kemudian memberitahu grup keluarga.) serta bertakwa kepada tuhan (Andi bangun pagi, salat Subuh berjamaah di masjid sebelum berangkat sekolah. Ia juga menghormati teman yang berbeda agama saat pergantian semester.) Siswa yang mendapat paparan program literasi digital secara berkala menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memilah informasi berdasarkan kredibilitas sumber, bukan hanya berdasarkan kesenangan emosional atau tekanan teman sebaya (Indriyani et al., 2021). Hal ini sejalan dengan temuan Choi (2016) bahwa pendidikan kewarganegaraan digital (digital citizenship education) yang terstruktur menghasilkan peserta didik yang lebih skeptis konstruktif—yakni terbuka terhadap gagasan baru namun tetap meminta bukti sebelum menerima klaim tertentu. Dampak jangka panjangnya meliputi penurunan perilaku cyberbullying, berkurangnya penyebaran hoaks antarsiswa, dan meningkatnya partisipasi siswa dalam diskusi kelas yang sehat. Agustina (2018) mencatat bahwa sekolah yang mengimplementasikan "Jumat Ceria Bersama Literasi Digital" mengalami penurunan 52% laporan konflik daring antar siswa dalam satu tahun ajaran. Selain itu, siswa mulai aktif membuat konten edukatif seperti poster infografis anti-hoaks, video pendek cek fakta, dan artikel blog sederhana—yang mencerminkan dimensi Kreatif dalam Profil Pelajar Pancasila. Ketika siswa dilibatkan sebagai agen literasi digital (digital literacy agents), mereka tidak lagi pasif menerima informasi, melainkan proaktif menangkal misinformasi di lingkungan pertemanan maupun keluarga. Model peer-education ini memperkuat civic disposition karena siswa merasa memiliki otoritas dan tanggung jawab moral untuk menjaga kebersihan informasi di komunitas mereka (Nugroho & Syarifuddin, 2021).



Transformasi dari konsumen pasif menjadi produsen konten positif inilah yang diharapkan dapat membangun generasi muda Indonesia yang tidak only digitally safe, tetapi also digitally empowered.

KESIMPULAN

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Sekolah Dasar memegang peranan sangat penting dan strategis dalam upaya penguatan literasi digital serta pembentukan ketahanan peserta didik terhadap hoaks dan disinformasi. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan tiga komponen kompetensi kewarganegaraan—civic knowledge, civic skills, dan civic disposition—siswa tidak hanya memahami secara konseptual apa itu hoaks dan dampaknya, tetapi juga dibekali keterampilan praktis untuk memverifikasi informasi serta mengembangkan sikap kritis, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital. Strategi seperti Think Check Share, Fact-Checking Club, dan integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam aktivitas sehari-hari terbukti efektif meningkatkan kesadaran literasi digital peserta didik SD. Kendati demikian, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan kompetensi digital guru, rendahnya literasi orang tua, durasi pembelajaran yang terbatas, serta ketimpangan akses teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi multipihak—antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan platform digital—serta komitmen politik untuk menjadikan literasi digital sebagai kompetensi inti dalam kurikulum PPKn SD. Dengan demikian, PPKn dapat menjadi benteng utama dalam mencetak generasi emas Indonesia yang cerdas, bijaksana, dan beradab di era informasi abad ke-21.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanik, B., Maulana, Y. C., & Amin, A. (2022a). Pelatihan Media Canva Dalam Meningkatkan Literasi Digital Dan Kreativitas Anak Di Desa Sumberjaya. *AnNizam*, 1(1), 81–86.
- Agustina, I. (2018). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 4120–4126.
- Agustina, Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Siswa di Sekolah Dasar, 2018
- Alhakim, A., Tantimin, Situmeang, A., & Jonathan, F. (2025). Ensuring Digital Safety for Students through Legal Measures Against Hoaxes and Cyberbullying. *Sasenal: Jurnal Studi Hukum dan Islam*, 3(1), 1–15.
- Aliyyah, R. R., Rahmawati, R., sepriyani W., Safitri, J., & Ramadhan, S. N. P. (2021). Kuliah kerja nyata: Pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan pendampingan Pendidikan. *Jurnal Masyarakat mandiri*, 5(2), 633-676.
- Alvira Oktavia Safitri, Dkk. *Jurnal Basicedu*, Vol 5 No.6 (2021) “Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Pribadi yang Berkarakter pada Anak Sekolah Dasar”. <https://jbasic.org/index.php/basicedu> 89
- BSSN. (2023). Laporan Survei Kompetensi Digital Guru Indonesia. Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara.
- Choi, M. (2016). A Concept Analysis of Digital Citizenship for Democratic Citizenship Education. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607.
- Darmawan, N. H., dkk. (2023). Literasi Digital: Pemahaman Cyberbullying pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Madaniya*, 4(4).
- Darmawan, N. H., Hilmawan, H., Seftian, D., Aulia, L., Hikmatullah, L., Zahira, M., Ramdan, M., Ridwan, M., Fahrhan, M. N., Ahmad, R., Syamsal, R., Futiannisa, S., Hamidah, S.,



- Jihan, S., & Sopia, S. (2023). Literasi Digital : Pemahaman Cyberbullying pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Madaniya*, 4(4).
- Indriyani, F., Nurhasanah, L., & Fauziah, L. (2021). Digital Literacy Empowerment Program for Junior High School Teachers: Community Service Approach. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(2), 79–88.
- Iskandar, D., & Nurgiansah, T. H. (2022). The Role of Civic Education in Countering Hoaxes in the Digital Age. *Journal of Digital Literacy and Citizenship*, 2(1), 12–25.
- Islami, A., Nulhakim, L., Dwi, A., & Suhandoko, J. (2024). Pengaruh Penggunaan Literacy Cloud terhadap Minat Baca dan Keterampilan Membaca Pemahaman. 6(1), 670–680.
- Jamiah, Yulius. 2012. Pembiasaan Sikap Positif Dalam Membangun Karakter Mahasiswa Melalui Pembelajaran Matematika. Yogyakarta : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. hlm 185.
- Kamza, M., Husaini, & Ayu, I. L. (2021). *Jurnal Basicedu*. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 4120–4126.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). Pedoman Masyarakat Sadar Berita Bohong: Cek Fakta 3L. Jakarta: Kominfo.
- Kholis, N., & Rosyada, D. (2022). Urgensi Civic Skills dalam Pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah untuk Menangkal Berita Palsu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, 10(3), 250–265.
- Kusumawati, M., Daryanto, J., Bayu Kurniawan, S., Guru Sekolah Dasar, P., Sebelas Maret, U., Slamet Riyadi No, J., Surakarta, K., & Tengah, J. (n.d.). Efektivitas penggunaan media literacy cloud.org terhadap minat baca materi paragraf argumentasi kelas iv di sekolah dasar.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- News Literacy Project. (2020). Think. Check. Share.: An Internet Literacy Campaign for Teens. Diambil dari <https://www.newslit.org/think-check-share>
- Nugroho, Y., & Syarifuddin, A. (2021). Literasi Digital sebagai Penguatan Kompetensi Kewarganegaraan Abad ke-21. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 45–56.
- Rahayu, D. A., Ulum, B., & Putra, A. A. P. E. (2025). Literasi Digital dalam Pembelajaran PKN Berbasis Saintifik untuk Penguatan Civic Disposition. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 6(3), 1642–1649.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 148.
- Sari, D. P., & Widodo, S. T. (2021). Pembelajaran PPKn Berbasis Isu Aktual dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 98–108.
- UNESCO. (2021). *Media and Information Literacy: Curriculum for Teachers* (Rev. ed.). Paris: UNESCO Publishing.
- Winarno. (2020). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, U. S., & Sukmadinata, N. S. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zahwa Annisa, Vol.3, No.1(2026) KAMPUS AKADEMIK PUBLISING, DOI : <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i1.8189>